

PENGARUH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM P2WKSS KABUPATEN SUMEDANG

Anne Friday Safaria*, Ririn Rosmalia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April

E-mail: annefriday2203@gmail.com

ABSTRACT

Through this theory, it will be known the causes that are easy and difficult to seek to empower women with the aim of supporting community welfare, the impact is felt limited to the aspects of knowledge of the program, the activities that are followed, the level of participation stories and program benefits. The activeness of women in various fields of life is generally determined and influenced by different backgrounds and similarities in explaining women through structural functional theory, power and status theory, non-verbal communication theory, rape-prone and rape-free theory, and division of labor theory. It also explains all activities that have been carried out and the level of achievement, the level during the implementation of the women's empowerment program. The research objectives are: 1. to know and study all activities carried out in the women's empowerment program at the Social Service 2. to find out and study the impact of implementing women's empowerment programs on the community. The results showed that various activities were related to community welfare, especially for women who already had families. This women's empowerment program, among others, is given to understand the important role of women in leading to a healthy family. The influence of this women's empowerment program is quite large. This can be seen from the capacity and capacity of the community which is getting bigger in developing themselves. In addition, public awareness also strengthens the importance of women's roles.

Keywords: Effectiveness, Women Empowerment

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah ini memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan kemampuan daerah termasuk tugas yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang untuk menjalankan tugas atau urusan kepentingan masyarakat setempat. Kementerian Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagaimana telah dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Kementerian Sosial yang berbunyi "Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara".

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang memiliki program P2WKSS di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Jawa Barat Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kesadaran dan sikap mental wanita dalam mewujudkan dan mengembangkan kehidupan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia.

Untuk itu, sejak lama telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera dengan sasaran utama wanita usia 10 tahun sampai usia 44 tahun dari keluarga yang bergolongan berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah di desa rawan sosial dan ekonomi. Kegiatan yang

dilakukan antara lain berupa pemasyarakatan P-4, pemberantasan tiga buta, pembinaan kesehatan lingkungan, keluarga berencana, gizi dan pertanian.

Proses dalam menjalankan program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang terlebih dahulu mencari wilayah kelurahan yang akan dijadikan sebagai lokasi program Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera.

Dalam mencari lokasi program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan kemudian melihat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dimana sasaran penerima 10 tahun sampai usia 44 tahun dari keluarga yang bergolongan berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah di desa rawan sosial dan ekonomi.

Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pemasyarakatan P-4, pemberantasan tiga buta, pembinaan kesehatan lingkungan, keluarga berencana, gizi dan pertanian.³ Proses dalam menjalankan program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang terlebih dahulu mencari wilayah kelurahan yang akan dijadikan sebagai lokasi program Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera.

Dalam mencari lokasi program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan kemudian melihat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dimana sasaran penerima Kegiatan yang dimiliki oleh program P2WKSS dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kaum perempuan melalui kegiatan program P2WKSS maka dibutuhkan pemberdayaan dalam melaksanakan

kegiatan tersebut oleh Dinas pemberdayaan perempuan Kabupaten Sumedang. Salah satunya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang dalam kegiatan program Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera yaitu pemberdayaan kelompok wanita tani dalam mengelola lahan perkebunan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok tani, selain itu terdapat pemberdayaan yang dilakukan dalam kegiatan program P2WKSS yang lain.

Berdasarkan hasil observasi sementara, peneliti melihat adanya indikasi masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di kabupaten sumedang dalam mewujudkan peningkatan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Sumedang, dengan indikasi-indikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya jumlah perempuan yang kurang pengetahuan dalam aspek ekonomi dan kehidupan sosial untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera di Kabupaten Sumedang.
2. Rendahnya peran wanita dalam suatu keluarga karena adanya perbedaan gender sehingga sudut pandang perempuan terlihat lemah di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan indikasi tersebut diatas, peneliti menduga bahwa peran wanita dalam menciptakan keluarga sehat dan sejahtera dimungkinkan bahwa masih kurangnya pembinaan untuk pemberdayaan perempuan, hal ini bisa dilihat dari indikasi-indikasi masalah sebagai berikut:

1. Alokasi dana untuk pembinaan perempuan tidak sebanding dengan besaran masalah sosial yang dihadapi. Dengan dukungan dana yang sangat terbatas maka pembangunan kesejahteraan bagi perempuan tidak akan efektif dan bersekala luas.
2. Upaya terhadap pemberdayaan perempuan dalam program P2WKSS

seringkali hanya berskala kecil juga adanya keterbatasan pengetahuan dan jaringan sosial untuk perkembangan perempuan. Tetapi tidak ditindak lanjuti dengan diadakannya pembinaan yang berskala luas dan fasilitas yang memadai dalam mengembangkan potensi-potensi yang perempuan miliki dalam membangun keluarga sehat dan sejahtera.

Dengan demikian fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Seberapa baik

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan sendiri banyak pihak yang mendefinisikan dan sudah pasti banyak perbedaan terutama kalau dilihat dari latar belakang dan sudut pandang bidang ilmu yang mendefinisikan. Hal ini dikemukakan oleh Robinson, (Akadun. 2005) mengatakan bahwa: "Pemberdayaan bermakna membawa orang kepada suatu perasaan mereka sendiri untuk bertindak dalam mencapai tujuan-tujuan mereka, terutama dalam menghadapi tantangan. Pemberdayaan membutuhkan sebuah konvergensi kapasitas, termasuk kemampuan menggunakan daya, mengakses lembaga, memelihara, dan mengajar persamaan (keadilan) yang melibatkan mendapat imbalan atas apa yang telah ditanam dan ide membagi secara fair sumber-sumber daya yang ada".

Menurut Cook (Makmur, 2007) mengatakan bahwa: "Pemberdayaan, terutama bagi anggota organisasi merupakan alat untuk memperbaiki kinerja, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi sampai kepada tingkat bawahan operasional dalam organisasi. Setiap individu yang memiliki keberdayaan akan mampu menciptakan wajah dan warna organisasi, serta akan mendapatkan kehormatan dan kepercayaan masyarakat. Keuntungan utama adanya pemberdayaan dalam organisasi adalah peningkatan kinerja sehingga hasilnya akan semakin besar pula karena setiap anggota organisasi,

pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumedang?; 2) seberapa baik efektivitas program P2WKSS di Kabupaten Sumedang?; 3) Adakah Hubungan pemberdayaan perempuan dengan efektivitas program P2WKSS di Kabupaten Sumedang?; 4) adakah pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap efektivitas program P2WKSS di Kabupaten Sumedang?.

anggota masyarakat, maupun aparatur pemerintah merasa memiliki tanggungjawab".

Sedangkan menurut Stewart (2008) "pemberdayaan yang secara etimologis berasal dari kata power yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi atau pun tidak sama sekali".

Dari beberapa definisi di atas pemberdayaan dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

Untuk mewujudkan pemberdayaan aparatur suatu organisasi terdiri dari pengadaan, pengembangan, pembinaan, penggajian, dan pengawasan. Pengadaan dari suatu organisasi dapat dilihat dari perencanaan yang tentunya perencanaan pengandaan, pengumuman, pelamar, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan aparatur kepada posisi kerja.

Pengembangan suatu organisasi pemerintah dilakukan untuk mengembangkan jati diri aparatur untuk menjadikan aparatur tersebut menjadi lebih baik dalam pencapaian tugas. Pembinaan dapat dilihat dari adanya tolak ukur prestasi kerja yang dihasilkan oleh aparatur yang telah mendapatkan pembinaan,

kemudian adanya gaji yang diterima oleh aparatur pemerintah atas pekerjaan yang telah dilakukan olehnya dan selanjutnya adanya pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah apa yang telah dicapai.

Keberhasilan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keinginan dan kehendak. Hal ini bukan hanya dapat mengontrol perbuatan-perbuatan atau kemampuan-kemampuan lain. Kehendak dapat memutuskan atau menentukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan, tetapi kehendak tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Kehendak hanyalah berlandaskan pada pemikiran kognitif (akal atau rasio), sedangkan tindakan berlandaskan pada pemikiran konatif (karsa) pada setiap manusia.

Pemberdayaan harus dimulai dari suatu proses yang dilandasi kebenaran dan kejujuran dalam memanfaatkan budaya, kekuasaan, dan sumber daya lainnya dari setiap anggota masyarakat maupun setiap anggota aparatur pemerintah. Penilaian tentang pemberdayaan tentunya akan mengarah kepada kesadaran yang lebih luas mengenai apa yang perlu mendapat perhatian ataupun upaya apa yang perlu diubah dan apa yang tidak perlu diubah. Pemberdayaan tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan yang menyeluruh, pemikiran yang mendalam, prosedur yang benar, pemantauan yang tepat, dan peningkatan terus menerus dari seluruh aspek kehidupan.

Dalam konsep pemberdayaan menampilkan dua kecenderungan Sedarmayanti (2000) diantaranya :

1. Pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi, atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

2. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan.

Pemberdayaan harus dimulai dari proses yang dilandasi kebenaran dan kejujuran dalam memanfaatkan budaya, kekuasaan, dan sumber daya lainnya dari setiap anggota masyarakat maupun setiap anggota aparatur pemerintah. Penilaian tentang pemberdayaan tentunya akan mengarah kepada kesadaran yang lebih luas mengenai apa yang perlu mendapat perhatian ataupun upaya apa yang perlu diubah dan apa yang tidak perlu diubah. Pemberdayaan tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan yang menyeluruh, pemikiran yang mendalam, prosedur yang benar, pemantauan yang tepat, dan peningkatan terus-menerus dari seluruh aspek kehidupan.

Prinsip-prinsip Pemberdayaan Terdapat empat prinsip pemberdayaan yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu :

1. Kesetaraan Merupakan prinsip utama dari proses pemberdayaan. Kesetaraan disini adalah adanya kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.
2. Partisipasi Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan di evaluasi oleh masyarakat.

- a. Makna partisipasi dalam pembangunan atau pemberdayaan menurut Asngari adalah individu atau masyarakat secara aktif terlibat dalam pembangunan.
 - b. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
 - c. Keterlibatan dalam pengawasan
 - d. Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan.
 - e. Partisipasi sebagai proses pemberdayaan
 - f. Partisipasi bermakna kerja kemitraan.
3. Kesewadayaan atau Kemandirian Prinsip kemandirian adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.
4. Keberlanjutan Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang.

Pemberdayaan Perempuan

Prijino dan Pranarki (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capasiti building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan

persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan Negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. Cakupan dai pemberdayaan tidak hanya pada level individu namun juga pada level masyarakat dan aturan-aturannya. Yaitu menanamkan aturan nilai-nilai budaya seperti kerja keras, keterbukaan dan tanggungjawab. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata power yang artinya keberadaan atau kekuasaan.

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi. Dan komunikasi diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrol atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan didenfinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya.

Kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran). Jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri

individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, kesadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.

Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik.

Menurut Zakiyah (2010), pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking (teman di belakang) bagi suami serta anggapan warga nunut neraka katut (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.
2. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, misalnya; ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

Menurut Suharto (2017) ada 5 kata kunci untuk mengukur teori pemberdayaan perempuan yaitu :

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri agar dapat menunjang kemandirian masyarakat tersebut.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok-kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan mendominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjerumus dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Efektivitas Program

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Pengertian efektivitas program menurut direktorat jenderal pembinaan pelatihan

dan produktivitas Departemen Ketenagakerjaan (Setiawan 2005) bahwa: "Efektivitas program merupakan penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program."

Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Patrick (Cascio 1995) bahwa "Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti". Sedangkan Tulus (Tangkilisan, 2005) menyatakan bahwa "Bermanfaatkah dan puaskah peserta pelatihan terhadap program pelatihan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi peserta terhadap program pelatihan".

Dari definisi menurut ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah proses penilaian terhadap suatu program untuk mengukur seberapa efektivitas suatu program, dimana dapat diumpamakan dalam kegiatan program pelatihan. Suatu program pelatihan dikatakan sukses dapat dilihat dengan dilakukannya pengukuran terhadap reaksi peserta program.

Sementara Gibson (Tangkilisan 2005) mengatakan mengenai ukuran efektivitas program, sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Tersedianya sarana dan prasarana;
6. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dari ukuran efektivitas program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Tujuan merupakan suatu patokan atau titik pencapaian didalam organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengukuran efektivitas suatu program diperlukannya perincian akan tujuan program dengan jelas mulai dari perumusan tujuan, adanya penyusunan program, program yang memiliki dasar pelaksanaan dan suatu program dibuat berdasarkan kebutuhan yang dianggap penting.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
Strategi merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, strategi merupakan hasil pemikiran dengan berprinsip pada cara bagaimana tujuan dapat dengan mudah dicapai. Tercapainya tujuan dari suatu program melalui beberapa proses dan upaya mulai dari strategi koordinasi, komunikasi dan strategi pengawasan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
Proses perumusan permasalahan program dilakukannya pengkajian, adanya pendataan, serta adanya konsultasi. Dimana setiap kebijakan yang diputuskan merupakan hasil pemikiran yang matang dan mempertimbangkan hasil analisis ketiga faktor tersebut.
4. Perencanaan yang matang
Dalam upaya pencapaian tujuan diperlukan penyusunan perencanaan yang matang. Perencanaan adalah proses perumusan segala hal kebutuhan untuk pemcaipaan tujuan. Perencanaan suatu program yang baik ialah suatu program yang dapat mewujudkan misi organisasi, merealisasikan kebijakan, dapat menyesuaikan anggaran serta adanya prosedur dan aturan.
5. Tersedianya sarana dan prasarana
Penunjang suatu program menjadi hal yang dianggap penting meliputi sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang baik ialah yang menerapkan prinsip *input* yang minimal dengan mencapai *output* yang maksimal, serta kebutuhan

penunjang tersebut dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan suatu program tersebut. Kebutuhan yang baik yaitu yang dapat mencakup kebutuhan visi dan misi program, pihak sasaran program dan berbagai hal yang dianggap mendukung dalam pencapaian hasil program.

6. Sistem pengawasan dan pengendalian Dalam pelaksanaan suatu program harus dilakukan suatu proses

pengawasan dan pengendalian sehingga setiap langkah atau kebijakan untuk mencapai tujuan program akan tetap terkendali. Sistem pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan pengarahan dan pemeriksaan.

METODE

Dalam metode ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian metode Kuantitatif penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel satu atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain.

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan perhitungan

prosentase, uji normalitas data, uji korelasi, uji signifikansi, dan uji koefisien determinasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebanyak 34 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh sehingga seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan Prosentase Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Sumedang

Untuk memberi interpretasi terhadap pemberdayaan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang maka total skor ideal dapat dihitung sebagai berikut:

1. $20 \text{ (item)} \times 34 \text{ (responden)} \times 5 \text{ (nilai skor)} = 3400$
2. $20 \text{ (item)} \times 34 \text{ (responden)} \times 4 \text{ (nilai skor)} = 2720$
3. $20 \text{ (item)} \times 34 \text{ (responden)} \times 3 \text{ (nilai skor)} = 2040$
4. $20 \text{ (item)} \times 34 \text{ (responden)} \times 2 \text{ (nilai skor)} = 1360$
5. $20 \text{ (item)} \times 34 \text{ (responden)} \times 1 \text{ (nilai skor)} = 680$

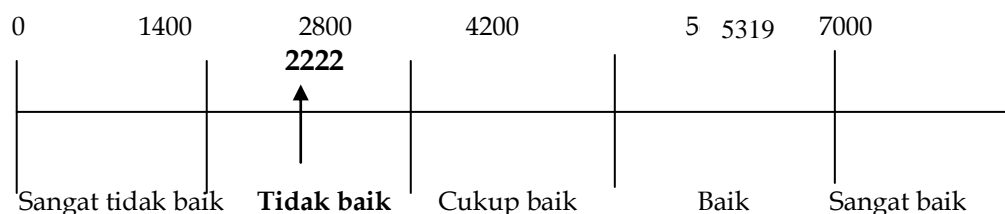
Tabel 1. Daftar Total Skor Variabel Pemberdayaan Perempuan

No Butir	Skor
1	126
2	92
3	126
4	93
5	159
6	96
7	159
8	125

9	119
10	98
11	98
12	98
13	98
14	98
15	95
16	129
17	95
18	95
19	129
20	94
Jumlah	2222

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa dari pemberdayaan 2222. Sedangkan skor

terendah 1400 dan skor tertinggi 7000 maka secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tingkat Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa pemberdayaan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang mencapai 2222 hal ini termasuk pada kategori **Tidak baik**.

Untuk mengetahui seberapa baik pemberdayaan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\% = \frac{2222}{3400} \times 100\% = 65,35\%$$

Jadi berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang mencapai 65,35%.

Hasil Perhitungan Prosentase Efektivitas Program P2WKSS di Kabupaten Sumedang

Untuk memberi interpretasi terhadap pemberdayaan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang maka total skor ideal dapat dihitung sebagai berikut:

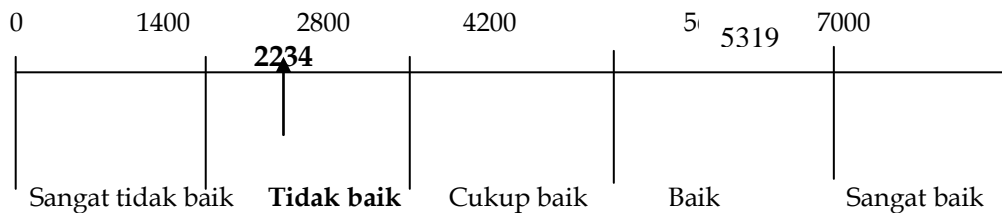
1. 20 (item) x 34 (responden) x 5 (nilai skor) = 3400
2. 20 (item) x 34 (responden) x 4 (nilai skor) = 2720
3. 20 (item) x 34 (responden) x 3 (nilai skor) = 2040
4. 20 (item) x 34 (responden) x 2 (nilai skor) = 1360
5. 20 (item) x 34 (responden) x 1 (nilai skor) = 680

Tabel 2. Daftar Total Skor Variabel Pengawasan Internal

No Butir	Skor
1	161
2	127
3	161
4	93
5	93
6	93
7	158
8	158
9	97
10	94
11	94
12	127
13	93
14	93
15	93
16	127
17	93
18	93
19	93
20	93
Jumlah	2234

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa dari pemberdayaan 2222. Sedangkan skor

terendah 1400 dan skor tertinggi 7000 maka secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Tingkat Efektivitas Program P2WKSS di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa Efektivitas Program Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang mencapai 2234 hal ini termasuk pada kategori **Tidak baik**.

Untuk mengetahui seberapa baik pemberdayaan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\% = \frac{2234}{3400} \times 100\% = 65,70\%$$

Jadi berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang mencapai 65,70%

Hasil Uji Korelasi

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel pemberdayaan perempuan dengan variabel efektivitas program P2WKSS dilakukan dengan

menggunakan rumus *Pearson Product Moment*. Guna memudahkan penghitungan dari setiap komponen yang diperlukan, maka selanjutnya

penulis menyusun tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi dengan cara sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Penolong Uji Korelasi

No. Res	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	4	70	16	4900	280
2	4	70	16	4900	280
3	4	69	16	4761	276
4	3	55	9	3025	165
5	3	56	9	3136	168
6	3	55	9	3025	165
7	3	56	9	3136	168
8	3	56	9	3136	168
9	4	70	16	4900	280
10	3	52	9	2704	156
11	3	52	9	2704	156
12	3	57	9	3249	171
13	3	56	9	3136	168
14	3	59	9	3481	177
15	4	71	16	5041	284
16	4	69	16	4761	276
17	4	70	16	4900	280
18	4	70	16	4900	280
19	4	69	16	4761	276
20	4	69	16	4761	276
21	4	69	16	4761	276
22	4	69	16	4761	276
23	4	70	16	4900	280
24	4	69	16	4761	276
25	4	69	16	4761	276
26	4	70	16	4900	280
27	4	69	16	4761	276
28	4	70	16	4900	280
29	4	69	16	4761	276
30	4	70	16	4900	280
31	4	70	16	4900	280
32	4	69	16	4761	276
33	4	69	16	4761	276
34	4	69	16	4761	276
JUMLAH	126	2222	474	146666	8334

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari jumlah responden (n)=34 diperoleh $\sum X=126$, $\sum Y= 2222$, $\sum X^2=474$, $\sum y^2=146666$ dan $\sum XY= 8334$ dan sehingga hasil tersebut dimasukan

kedalam rumus korelasi produk momen akan diperoleh hasil tersebut:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2][n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$$\frac{n \cdot \sum xy - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$\frac{34.8334 - (126)(2222)}{\sqrt{\{34.474 - (126)^2\} \{34.146666 - (2222)^2\}}}$$

$$\frac{3.384}{\sqrt{\{16.116 - 15.876\} \{4.986.644 - 4.937.284\}}}$$

$$\frac{3.384}{\sqrt{\{240\} \{49.360\}}}$$

$$\frac{3.384}{\sqrt{11.846.400}}$$

$$= 0,96$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari data tabel di atas, di peroleh nilai koefisien (r) hitung sebesar 0,96. Jika r_{hitung} tersebut apabila diinterpretasikan pada skala pengukuran menurut Sugiyono (2003) yaitu:

Tabel 4. Pedoman Untuk Memberikan interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Memperhatikan hasil perhitungan korelasi antara kedua variabel diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,96, kemudian harga r tersebut di interpretasikan pada tabel di atas, ternyata nilai koefisien korelasi 0,96 berada pada kategori **Sangat Kuat**. Jadi terdapat hubungan yang kuat antara Pemberdayaan dengan efektivitas program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

Hasil Uji Signifikansi

Uji signifikansi untuk mengetahui apakah hubungan antara kedua variabel tersebut signifikansi atau tidak, maka digunakan uji statistic dua pihak (*two tail test*) yaitu uji pihak kanan dan pihak kiri. Selanjutnya nilai r dari hasil uji korelasi kedua variabel di atas, dimasukan ke dalam uji statistic dua pihak, sehingga diperoleh nilai t hitung, sebesar:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,96\sqrt{34-2}}{\sqrt{1-(0,96)^2}}$$

$$t = \frac{0,96\sqrt{32}}{\sqrt{1-0,921}}$$

$$t = \frac{0,96 \times 5,65}{\sqrt{0,281}}$$

$$t = \frac{5,42}{0,53}$$

$$t = 10,22$$

Harga t hitung tersebut selanjutnya di konsultasikan ke dalam tabel t (daftar uji dua pihak dengan taraf kesalahan 5% (a = 0,05) pada dk = n - 1 = 34 - 1 = 33, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,991.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui pengaruh (derajat keterikatan) variabel pemberdayaan terhadap efektivitas program, peneliti menggunakan rumus koefisien determinasi menurut Sugiyono (2003) sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,96^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,9216 \times 100\%$$

$$KD = 92,16\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai prosentase sebesar 92,16%. Hal ini mengandung makna bahwa pengaruh Pemberdayaan terhadap Efektivitas Program di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebesar 92,16%, sedangkan sisanya sebesar 7,84% diperoleh oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.

PENUTUP

Kesimpulan

Terdapat Hubungan Pemberdayaan Perempuan Terhadap Efektivitas Program P2WKSS di Kabupaten Sumedang menunjukkan kategori sedang. Terdapat persentase sebesar 58% hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut, hubungan yang positif yang memiliki hubungan satu sama lain.

Saran

1. Dilihat masih banyaknya jumlah perempuan yang kurang pengetahuan dalam aspek ekonomi dan kehidupan sosial untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera di Kabupaten Sumedang, maka untuk meminimalisir hambatan tersebut perlu didukung dengan adanya sosialisasi pengetahuan dalam aspek ekonomi dan kehidupan sosial agar mengurangi jumlah perempuan yang kurang berpengetahuan.
2. Dikarenakan rendahnya peran wanita dalam suatu keluarga karena adanya perbedaan gender sehingga sudut pandang perempuan terlihat lemah di Kabupaten Sumedang, maka perlu adanya pendidikan adil gender dalam keluarga sebagai salah satu bagian

penting yang dapat merubah paradigma berpikir adil gender.

3. Dilihat dari upaya terhadap pemberdayaan perempuan dalam program P2WKSS seringkali hanya berskala kecil juga adanya keterbatasan pengetahuan dan jaringan sosial untuk perkembangan perempuan. Tetapi tidak ditindak lanjuti dengan diadakannya pembinaan yang berskala luas dan fasilitas yang memadai dalam mengembangkan potensi-potensi yang perempuan miliki dalam membangun keluarga sehat dan sejahtera. Maka, dibuatlah upaya-upaya untuk mengembangkan potensi-potensi yaitu:
a) Meningkatkan status kesehatan & pendidikan perempuan; b) Meningkatkan pengetahuan perempuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif; c) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup; d) Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat; e) Meningkatkan wawasan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. 2019. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan 8. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, S. P. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Cetakan 8. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handyaningrat, S. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Cetakan 16. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Henry, S. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YPKN.
- Iskandar. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Silalahi, U. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Cetakan 9. Bandung: CV Sinar Baru
- Sugiyono dan Susanto, Agus. 2017. *Cara Mudah Belajar Spss Dan Lisrel Teori Dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi dengan Metode R&D*. Cetakan 24. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. 2010. *Metode Ramalan Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.